



## Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Anggaran Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi melalui Integrasi Sistem Informasi Keuangan

Lussiana, Titik Mildawati, Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indoneisa (STIESIA), Jl. Menur Pumpungan No. 30, Kecamatan Sukolilo Surabaya, Jawa Timur 60118

fidiana@stiesia.ac.id

doi.org/10.18382/jraam.v4i1.001

### Informasi Artikel

Tanggal masuk	16-06-2019
Tanggal revisi	25-07-2019
Tanggal diterima	26-07-2019

### Keywords:

Transparency  
Accountability  
Budget Performance  
Performance Contract  
SipMonev

### Abstract

*This study aims to explore the form of transparency and accountability in budget performance in encouraging organizational performance improvement. Data obtained from key informants then presented with an interpretive approach. The result is budget performance can reach good university governance through the integration of SIPMonev and SIM RBA. The transparency aspect is fulfilled by publishing all reports to the public. While accountability is shown by fulfilling performance contract to Ministry of Research and Technology and standard of fees that set by Ministry of Finance.*

### Kata kunci:

Transparansi  
Akuntabilitas  
Kinerja Anggaran  
Kontrak Kinerja  
SipMonev

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggali bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja anggaran dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi. Data diperoleh dari informan kunci kemudian disajikan dengan pendekatan interpretif. Ditemukan bahwa kinerja anggaran dapat mewujudkan *good university governance* melalui integrasi SIPMonev dan SIM RBA. Aspek transparansi terpenuhi dengan mempublikasi seluruh laporan kepada publik. Akuntabilitas diwujudkan dengan memenuhi kontrak kinerja dengan Kemenristek Dikti dan standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.



### 1. Pendahuluan

Perbaikan kinerja anggaran dari pengelolaan anggaran tradisional menjadi anggaran berbasis kinerja merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan citra perguruan tinggi di tingkat nasional dan internasional. Anggaran berbasis kinerja menggambarkan relasi keberhasilan

keterserapan dana program dengan *outcome* yang diharapkan dari sebuah program kerja. Sehingga tujuan organisasi yang ingin dicapai dapat terprogram dengan baik dalam anggaran. Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi pada forum pertemuan PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) seluruh Indonesia pada tanggal 4

April 2019 di ITS Surabaya.

Anggaran merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik. Anggaran dapat menggambarkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu.

Pemerintah mendorong Perguruan Tinggi Negeri yang dinilai sudah memiliki kemampuan pengelolaan yang mencukupi untuk dapat mandiri, otonom, dan bertanggung jawab dengan mengubah status hukumnya menjadi PTN (Perguruan Tinggi Negeri) Badan Hukum.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang telah resmi ditetapkan sebagai PTNBH berdasarkan PP No. 83 Tahun 2014. Status ini menuntut ITS agar dapat meningkatkan citra bangsa melalui ketercapaian tata kelola yang baik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menristek Dikti No. 40 Tahun 2016. Salah satu upaya ITS untuk memenuhi tuntutan tersebut yaitu dengan memperbaiki sistem informasi keuangan melalui integrasi Sistem Informasi Manajemen Rencana Bisnis Anggaran (SIM RBA) yang memuat rincian aktivitas kegiatan anggaran dan rincian dana setiap aktivitas anggaran dengan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (SIPMonev) yang memuat seluruh rencana anggaran berupa program, sub program dan target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Integrasi tersebut dilakukan karena sistem RBA dan sistem perencanaan yang telah diterapkan sebelumnya dinilai belum efektif dalam mendorong peningkatan kinerja anggaran ITS setelah menjadi PTN Badan Hukum. Hal itu dikarenakan SIM RBA dan sistem perencanaan anggaran ITS dibuat secara terpisah dan hanya berisi tentang rencana kegiatan dan anggaran dalam bentuk laporan pendanaan saja. Selanjutnya, kegiatan anggaran non keuangan masih terpisah sehingga membutuhkan waktu lebih lama jika ingin mendapatkan semua laporan baik

laporan keuangan maupun non-keuangan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi berkala.

Selain itu, integrasi SIM RBA dengan SIPMonev diharapkan dapat mendorong pejabat-pejabat atau petugas yang berwenang mampu melihat sejauh mana anggaran sudah terlaksana atau terealisasi, termasuk pencapaian keluarannya. Integrasi tersebut diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat kebutuhan perolehan data atau informasi realisasi kegiatan berdasarkan perencanaan dan anggaran serta capaian output secara *real time* dan *up to date*. Adanya integrasi sistem informasi keuangan ini dapat mendorong keterbukaan informasi dan kecepatan serta ketepatan dalam pengambilan keputusan sehingga diharapkan peningkatan kinerja anggaran dapat tercapai. Secara teknis kinerja anggaran yang baik bagi suatu organisasi dapat tercapai ketika pengelolaan anggaran organisasi yang bersangkutan telah transparan dan akuntabel sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2009), bahwa anggaran merupakan perilaku manusia dalam rangka mencapai tujuan keuangan [1]. Namun bagi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. *Good governance* juga dimaknai sebagai bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai pasca krisis multidimensi, seiring dengan tuntutan era reformasi [2].

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik *good governance*. Praktik *good governance* mensyaratkan transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah juga dituntut untuk terbuka kepada *stakeholder*, sehingga *stakeholder* dapat mengakses seluruh informasi publik termasuk kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan

kebijakan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan [3],[4]. Penelitian Gunawan (2016) menemukan upaya transparansi anggaran di Kabupaten Blitar melalui publikasi informasi dan dokumen proses perencanaan program sampai dengan penganggaran yang tersedia secara *online* atau berbasis *website* [5]. Hal ini diketahui dapat mempermudah masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol pemerintah terkait pelaksanaan program pemerintah yang telah dilaksanakan kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja Pemkab Blitar. Transparansi sebagai salah satu ukuran penting dari *good governance*, sehingga *governance* yang baik atau buruk, salah satunya ditentukan oleh tingkat transparansi oleh pemerintah [5],[6].

Akuntabilitas dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi karena mencerminkan akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan program kerja sebagaimana yang telah ditetapkan. Akuntabilitas juga dapat dimaknai sebagai alat yang menjamin terselenggaranya setiap kegiatan yang akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan terutama yang terpapar kebijakan. Hal ini didukung oleh beberapa hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi [7],[8],[9],[10]. LAKIP merupakan media akuntabilitas setiap organisasi sektor publik dan dapat mendukung terciptanya *good governance* yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sehingga akan mampu menunjukkan akuntabilitas publik kepada masyarakat yang akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa transparansi dan akuntabilitas kinerja anggaran dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi melalui perbaikan sistem informasi keuangan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana bentuk

transparansi dan akuntabilitas kinerja anggaran ITS Surabaya dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi melalui integrasi SIM RBA dan SIPMonev.

## 2. Metode

Pendekatan interpretatif dipilih sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Tujuan dari perkembangan teori ini adalah untuk menghasilkan deskripsi, pandangan-pandangan dan penjelasan mengenai fenomena tertentu [11]. Interpretatif termasuk dalam kategori perspektif subjektif, yaitu pendekatan yang mengasumsikan bahwa pengetahuan tidak mempunyai sifat objektif dan tetap. Selain itu, realita sosial dapat diasumsikan sebagai interaksi sosial yang bersifat komunikatif. Situs penelitian ini adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dan penelitian dilakukan selama bulan Oktober 2018 hingga Mei 2019. Subjek penelitian merupakan sumber data yang informasinya diambil sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh [12],[13]. Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Penguatan, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja ITS (Ka. UP4 ITS), Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran ITS, Wakil Dekan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang telah menjabat lebih dari 5 Tahun. Masa jabatan lebih dari 5 tahun ini dipilih dengan pertimbangan bahwa BPP tersebut telah mengalami 2 kali perubahan pengelolaan keuangan ITS, yaitu sebagai PTN Satuan Kerja pada tahun 2010 dan PTN Badan Hukum pada tahun 2018. Dengan demikian, informan dianggap mampu memberi informasi yang relevan atas perbedaan perubahan tata kelola organisasi ITS dibandingkan informan lainnya yang baru menjabat pada masa transisi dari PTN satuan kerja ke PTN Badan Hukum.

Penelitian ini menggunakan data primer yang di dapat dari kata-kata dan tindakan informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pengujian validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi dengan cara mengajukan pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda pada informan yang sama. Triangulasi juga dilakukan dengan mengonfirmasikan jawaban informan pada informan lainnya yang relevan sehingga peneliti memperoleh jawaban yang akurat dan konsisten.

Triangulasi juga dilakukan dengan membandingkan jawaban dari informan dengan dokumen-dokumen tertulis yang sudah ada, sehingga hasil wawancara dapat diyakini kebenarannya. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman (1992). Model ini menyaratkan adanya reduksi data kemudian dilanjutkan dengan penyajian dan diakhiri dengan induksi atau simpulan dan verifikasi [14]. Pengumpulan data dilakukan dengan terlebih dahulu memilih kasus terkait tujuan penelitian ini, membuat pertanyaan penelitian dan menentukan cara pengumpulan data. Setelah data terkumpul, peneliti mentransformasi data kasar dalam bentuk transkrip wawancara selama di lapangan kemudian dilanjutkan dengan membuat pengelompokan data atas berdasarkan topik-topik tertentu. Aktivitas ini dikenal dengan reduksi data. Selanjutnya, peneliti menyarikannya secara naratif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap peraturan adalah salah satu bentuk dari pemenuhan tanggungjawab organisasi sektor publik terhadap masyarakat. Dalam proses pemenuhan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tentunya dibutuhkan media informasi yang dapat mempermudah dan mempercepat proses tersebut sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan pengendalian secara *real time* dan *up to date*. Untuk itu ITS telah melakukan beberapa upaya agar

transparansi dan akuntabilitas kinerja anggarannya dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi melalui integrasi sistem informasi rencana bisnis anggaran dengan sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi. Berikut adalah penjabaran atas temuan-temuan yang peneliti dapatkan dari informan melalui proses wawancara bersama informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tujuan penelitian, kemudian peneliti juga melakukan observasi di lingkungan para informan bekerja agar diperoleh keyakinan atas informasi yang diberikan pada peneliti. Terakhir adalah mendokumentasikan hasil wawancara dari bentuk rekaman suara menjadi teks dan mengumpulkan beberapa dokumen yang dirujuk oleh para informan.

Penelitian ini membuktikan peran transparansi sebagai syarat utama terealisasinya akuntabilitas. Selain itu, transparansi akan terlaksana jika seluruh sumber daya berpartisipasi dalam menyediakan informasi yang memadai dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan. Ketersediaan informasi publik ini memungkinkan publik melakukan pengawasan dan evaluasi atas kinerja entitas.

Sebagaimana dijelaskan bahwa transparansi identik dengan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat [1],[6],[15]. Di era BHMN, transparansi merupakan hal penting baik itu menyangkut anggaran/keuangan dan pada proses bisnis lainnya. Transparansi atas proses anggaran/keuangan menjadi penting di era tersebut terutama dalam kaitannya.

Pelaksanaan anggaran di lingkungan ITS dari tahun 2017 hingga saat ini telah diupayakan agar seluruh informasi yang ada dapat diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya pada proses perencanaan hingga realisasi anggarannya. Pada tingkat institusi keterbukaan informasi dalam hal pelaksanaan

anggarannya jelas terlihat dengan adanya mekanisme pencairan pagu anggaran setiap bulannya, dimana untuk mencairkan dana anggaran pada bulan berikutnya harus dilakukan pada bulan sebelumnya, itu dikarenakan panjangnya proses birokrasi pencairan anggaran di ITS. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“Contohnya begini untuk mencairkan dana anggarannya setiap bulan, maka masing-masing unit harus melalui beberapa tahapan, yaitu validasi pencairan dana mulai dari diusulkan oleh BPP kemudian di valid oleh wakil dekan di tingkat fakultas, Kadep ditingkat departemen dan selanjutnya di valid oleh Dekan kemudian, di valid oleh Biro Keuangan mulai dari kasubbag kemudian Kabag, Kabiro dan terakhir adalah WR2.”

Hal tersebut dilakukan agar kegiatan pencairan anggaran setiap bulan pada masing-masing unit dapat diketahui dan dimonitor oleh seluruh lapisan *user* yang berkepentingan sebagai bentuk transparansi atas rencana penggunaan anggaran setiap bulannya. Selain paparan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran ITS tersebut contoh transparansi lainnya seperti yang disampaikan oleh informan di tingkat departemen yaitu terkait dengan pelaporan realisasi anggarannya, adapun paparannya sebagai berikut:

“Sekarang ini pelaksanaan anggaran di ITS itu sudah transparan, karena seperti kwitansi kalau jaman dulu kwitansi kita buat sendiri dan bisa ditumpuk terlebih dahulu setelah mendekati tanggal pelaporan baru di entri pada sim keuangan, nah kalau sekarang setiap transaksi pembelanjaan harus di entri pada hari itu juga dan format kwitansi sudah ada pada sistem, sehingga semua unit model kwitansinya sama dan monitoring penggunaan dana bisa *diupdate* sesuai dengan kenyataan

dilapangan setiap harinya. Selain itu jika ada pengeluaran yang tidak dianggarkan bulan ini tapi memang harus dikeluarkan karena urgent, contohnya ada kerusakan mobil tiba-tiba, jadi harus segera di *service* untuk itu ada kebijakan khusus yang harus disampaikan oleh kadep pada PPK dan Dirpal supaya bisa dientrikan pada bulan berikutnya.”

Transparansi menuntut seluruh informasi tersedia dengan memadai dan mudah diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Selain itu, transparansi memungkinkan seluruh *stakeholder* untuk dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja institusi. Hal ini juga telah dilakukan oleh ITS, dimana seluruh rencana kegiatan dan rencana anggarannya telah tersistem dalam SIPMonev dan SIM RBA yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Ini diperkuat dengan paparan dari beberapa informan sebagai berikut:

“Hal lain yang bisa dikatakan pelaksanaan anggaran di ITS sudah transparan adalah saat ini semua kegiatan anggaran sudah tersistem yang bisa dilihat kapan pun dan dimana pun oleh *user* yang berkewenangan.”

“Pelaksanaan anggaran baik di tingkat Institut, fakultas dan departemen ada sebagian yang transparan dan ada sebagian yg belum maksudnya disini karena anggaran ITS berbasis aktivitas, sehingga transparansi yang dimaksud memang sangat transparan bagi yang bersinggungan langsung dengan kegiatan RBA namun terkesan kurang transparan bagi yang tidak berkepentingan secara langsung dengan pelaksanaan anggaran.”

“SIPMonev dan SIM RBA bisa diakses oleh semua orang, tapi semua orang disini maksudnya adalah orang-orang yang berkepentingan saja. Contohnya adalah di tingkat

Departemen maka mulai dari kadep hingga lini terbawah semua tahu berapa besaran anggarannya dana apa saja program kerjanya. Berapa pagu yang terserap berapa yang belum berapa dana yang tidak bisa terlaksana, dan semua itu *terconnect* sehingga Rektor dapat melihat semua capaian SIPMonev dan RBA kapan saja dan dimana saja.”

Keterbukaan informasi lainnya adalah adanya transparansi dalam hal penilaian kinerja anggaran di lingkungan internal ITS sendiri. Hal ini diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Dalam SIPMonev itu setiap 6 bulan sekali kami selalu menyampaikan pada semua pimpinan unit hasil capaian mereka, nilai mereka berapa, dan darimana penilaian itu, cara kami menilai dan sebagainya itu secara terbuka, jadi jika dikatakan transparan kami sangat transparan terkait penilaian capaian kinerja unit, namun transparansi kami tergantung pada siapa orangnya atau artinya untuk kepentingan siapa.”

Dari penjelasan informan di atas, maka peneliti memaknai bahwa pelaksanaan anggaran yang ada di ITS memang sudah transparan bagi pihak internal, yaitu dimulai dari proses perencanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran kegiatan hingga pelaporan realisasi anggarannya. Seluruh kegiatan tersebut dapat dilihat kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja, namun siapa saja disini bagi pihak internal adalah yang bersinggungan langsung dengan seluruh proses pelaksanaan anggaran. Hal tersebut dikarenakan informasi yang diberikan pada pihak internal jelas harus lebih terperinci dan jelas, sehingga batasan tentang siapa yang harus mengetahui detail terkait pelaksanaan anggaran di ITS harus ditentukan. Sedangkan bagi pihak yang tidak bersinggungan langsung dengan pelaksanaan anggaran di lingkungan ITS atau bisa disebut pihak eksternal juga dapat dikatakan transparan.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“ITS harus melaporkan kinerjanya setiap 3 bulan sekali ke Menristek Dikti hingga 1 tahun anggaran, karena ITS juga harus memenuhi konkin Rektor dengan Menristek.”

Paparan Kepala UP4 ITS tersebut juga didukung oleh ungkapan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran ITS sebagai berikut:

“Sebagai PTNBH kita memiliki kewajiban yaitu setiap 3 bulan harus melaporkan ke negara daya serapnya/laporan serapan ITS.”

Selain itu, para informan juga menjelaskan bahwa ada hal lain yang dilakukan ITS untuk mewujudkan transparansi bagi masyarakat luas dengan cara menerbitkan seluruh laporan yang wajib dan mengumumkan laporan tersebut secara berkala. Laporan tersebut meliputi laporan tahunan Rektor, laporan keuangan tahunan, laporan kinerja tahunan dan sebagainya. Seluruh laporan tersebut telah diunggah oleh ITS pada *website* mereka pada laman <https://info.its.ac.id/menu/informasi-publik>. Namun terkait informasi publikasi yang telah dilakukan ITS melalui media website tersebut banyak tidak diketahui oleh informan dalam penelitian ini, hal ini sebagaimana telah diungkapkan oleh informan yang seluruhnya mengatakan bahwa mereka tidak tahu apakah laporan keuangan ITS telah dipublikasikan atau belum. Dari seluruh penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran di lingkungan ITS telah memenuhi kriteria transparan dari seluruh lapisan, yaitu bagi pihak internal dengan tersistemnya seluruh kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggarannya. Sebagai media transparansi bagi pihak eksternal dengan adanya pelaporan secara berkala setiap 6 bulan sekali pada Menristek Dikti terkait kinerja organisasinya menjadi dan telah

diterbitkannya seluruh laporan yang wajib diumumkan pada masyarakat luas melalui laman ITS. Selain itu kriteria lain yang terpenuhi adalah seluruh laporan tersebut dapat diakses kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja. Hal ini dengan pendapat bahwa transparansi berarti pemerintah terbuka dalam memberikan informasi yang seluas-luasnya dalam pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat [1,4,15].

Mengelola perguruan tinggi negeri identik dengan mengelola dana publik. Sudah sewajarnya pemerintah mampu menyediakan informasi hasil pengelolaan keuangan tersebut kepada publik secara tepat waktu, relevan, akurat, dan dapat dipercaya. Bagi ITS, akuntabilitas dimaksudkan untuk memberi pernyataan publik bahwa ITS telah berhasil/gagal dalam mencapai visi misinya termasuk tujuan dan sasaran perguruan tinggi [1],[16],[17],[18],[19].

Akuntabilitas menuntut ITS untuk menyajikan pertanggungjawabannya kepada publik atas setiap aktivitas akademik dan aktivitas tridharma perguruan tinggi. Tentunya ITS juga telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai akuntabilitas dalam pelaksanaan anggarannya. Upaya tersebut tercermin dari adanya pemenuhan standar atas seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang ada di ITS dan sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas. Pemenuhan terhadap standar yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah maupun manajemen ITS sendiri terlihat dari adanya kontrak kinerja antara Rektor dengan Menristek Dikti yang harus dicapai, dan pencapaian konkin tersebut adalah hasil dari pencapaian konkin antara Rektor dengan unit-unit dibawahnya. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan sebagai berikut:

“SIPMonev adalah capaian kinerja Rektor yang telah dijanjikan oleh Rektor pada Menteri, dimana konkin tersebut diturunkan oleh Rektor pada konkin Rektor dengan masing-masing fakultas maupun departemen guna mencapai kinerja tersebut.”

“Standar penyusunan Program kerja yang ada SIPMonev berdasar pada konkin antara Rektor dengan Menristek, Renstra dan Program kerja Rektor.”

Lebih lanjut Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran ITS juga menjelaskan bahwa mekanisme anggaran ITS adalah dimana seluruh pembiayaan yang terjadi digunakan untuk mencapai kontrak kinerjanya. Selain konkin, standar lain yang digunakan ITS sebagai acuan untuk pelaksanaan anggaran mengacu pada Standar Biaya Umum Pemerintah dan Standar Biaya Institut ITS, hal ini diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Standar belanja anggaran ITS menggunakan 2 standar yaitu Standar Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan oleh Kemenkeu dan yang kedua adalah Standar Biaya Institut (SBI) yang dibuat sendiri oleh ITS, tetapi besarnya tidak melebihi SBU.”

Penjelasan Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran ITS tersebut juga diperkuat dengan paparan yang disampaikan oleh BPP Departemen Statistika sebagai berikut:

“Yang saya jadikan acuan untuk melaksanakan anggaran adalah SBI dan SBU, tapi yang saya utamakan saat ini adalah SBI karena SBI lebih terperinci sesuai yang terjadi di ITS sedangkan SBU lebih generalisasi jadi jika dilaksanakan sepenuhnya di ITS bisa menimbulkan beda persepsi.”

Adapula lembaga independen di lingkup internal ITS yang bertugas sebagai auditor internal bagi seluruh laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang terjadi di ITS. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran ITS sebagai berikut:

“ITS memiliki sebuah Lembaga yang bernama Kantor Audit Internal (KAI) yang sangat independen dalam mengawal pelaksanaan anggaran, jadi

semua sumber dana akan diaudit oleh KAI sampai pada tahap dimana pelaporannya dianggap telah sesuai dengan aturan yang ada baik pada SBU maupun SBI.”

Paparan Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran ITS juga diperkuat dengan informasi yang disampaikan oleh BPP Departemen Statistika sebagai berikut:

“Saat ini rata – rata di ITS tidak ada unit yang membelanjakan anggaran melebihi SBI, karena jika KAI menemukan kelebihan belanja anggaran dari SBI maka akan menjadi temuan dan diharuskan mengembalikan ke ITS.”

Selanjutnya Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran ITS juga menyampaikan bahwa sebagai pemeriksa pertama pada setiap unit ada yang disebut dengan istilah PPK, dimana PPK ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggungjawab terhadap semua pelaporan pelaksanaan anggaran di masing-masing unit yang mana PPK diangkat berdasarkan ketetapan Rektor. Sistem pelaporan pelaksanaan anggaran di ITS juga dilaksanakan secara periodik, yaitu setiap 3 bulan sekali akan ada evaluasi dan monitoring melalui pengisian SIPMonev yang diinput berdasarkan data pada SIM RBA. Informasi ini berdasarkan paparan dari Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran ITS sebagai berikut dan BPP Departemen Statistika sebagai berikut

“Evaluasi berkala dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh ITS, kita membuat masa evaluasi dengan istilah Q1, Q2, Q3 dan Q4, dimana setiap 3 bulan masing-masing unit harus mengisi SIPMonev agar bisa diketahui sejauh mana proses pelaksanaan suatu rencana kegiatannya yang berdasar pada SIM RBA.”

“Nantinya tim manajemen setiap 3 bulan sekali akan mengisi capaian

SIPMonev berdasarkan pelaksanaan anggaran yang ada di SIM RBA.”

Beberapa penjelasan informan diatas membuat peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran di lingkungan ITS telah akuntabel. Hal tersebut terbukti dengan adanya pelaporan setiap 3 bulan sekali kepada Kemenristek Dikti sebagai bentuk pemenuhan capaian kontrak kinerja yang telah ditandatangani oleh Rektor dengan Kemenristek Dikti. Sementara itu, implementasi dan laporan SIPMonev merupakan bukti pemenuhan capaian internal atas kontrak kinerja Rektor dengan unit-unit kerja di bawahnya. Pemenuhan konkin secara internal juga direalisasi dalam bentuk tersedianya lembaga auditor internal; dikenal dengan Kantor Audit Internal (KAI) yang berfungsi melakukan pemeriksaan atas pelaporan pertanggungjawaban belanja anggaran setiap unit untuk memastikan bahwa seluruh belanja anggaran ITS tidak melebihi SBU dan SBI yang ada.

ITS juga berupaya memenuhi salah satu persyaratan sebagai PTNBH yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan Kantor Akuntan Publik. Akuntabilitas yang dimaksud oleh ITS ini adalah akuntabilitas program, yaitu bahwa setiap program kerja ITS diharapkan merupakan program kerja yang menunjang dalam pencapaian VMTS (visi misi tujuan dan sasaran) ITS [20]. Akuntabilitas juga ditandai dengan adanya integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan [21].

Kinerja dalam lingkup organisasi adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam melakukan suatu pekerjaan agar dapat dievaluasi tingkat kerjanya. Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Dampak dari tercapainya indikator transparansi dan akuntabilitas kinerja anggaran ITS melalui integrasi SIM RBA dan SIPMonev adalah perolehan status WTP dari BPK dan Kantor Akuntan Publik atas laporan keuangannya,

serta pencapaian sebagai juara pertama kinerja anggaran PTN Badan Hukum terbaik di Indonesia yang diberikan oleh Kemenristek Dikti tahun 2018.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa transparansi kinerja anggaran ITS bagi pihak internal dibuktikan dengan tersistemnya seluruh kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran pada SIM RBA dan SIPMonev. Sedangkan bagi pihak eksternal adanya pelaporan secara berkala setiap 6 bulan sekali pada Menristek Dikti terkait kinerja organisasinya dan telah terpublisnya seluruh laporan yang wajib diumumkan pada masyarakat luas melalui laman ITS. Selain itu kriteria lain yang terpenuhi adalah seluruh laporan tersebut dapat diakses kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja. Selanjutnya pelaksanaan anggaran di lingkungan ITS juga telah akuntabel, hal tersebut terbukti dengan adanya pelaporan setiap 3 bulan sekali pada Menristek Dikti merupakan bentuk capaian kontrak kinerja yang telah ditandatangani oleh Rektor dengan Menristek Dikti dan pengisian SIPMonev pada lingkup internal ITS setiap 3 bulan sekali sebagai wujud pemenuhan capaian kinerja atas konkin antara Rektor dengan unit dibawahnya adalah wujud akuntabilitas ITS sebagai PTN Badan Hukum sebagaimana telah diatur dalam Permenristek Dikti No. 40 Tahun 2016. Selain pemenuhan konkin melalui SIPMonev ada juga lembaga auditor internal ITS dengan nama Kantor Audit Internal (KAI) yang melakukan pemeriksaan atas pelaporan pertanggungjawaban belanja anggaran setiap unit untuk memastikan bahwa seluruh belanja anggaran ITS tidak melebihi SBU dan SBI yang ada. Hal lainnya yang dilakukan ITS adalah dengan memenuhi salah satu persyaratan sebagai PTNBH yaitu harus memiliki status laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan Kantor Akuntan Publik. Sehingga

dengan tercapainya transparansi dan akuntabilitas kinerja anggaran di ITS melalui integrasi SIM-RBA dan SIPMonev dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi ITS di tingkat nasional yaitu terlihat dari laporan kinerja ITS pada tahun 2018. Pada tingkat nasional, ITS mendapat penghargaan dari Kemristek Dikti sebagai terbaik pertama PTNBH dengan kinerja terbaik di Indonesia Tahun 2018 dan ditetapkan sebagai laporan keuangan ITS telah Wajar Tanda Pengecualian (WTP)

#### Daftar Rujukan

- [1] Mardiasmo. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *J Akunt Pemerintah* 2006;2.
- [2] Prianto AL. Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. *Otoritas J Ilmu Pemerintah* 2011;1. doi:10.26618/ojip.v1i1.11.
- [3] Muhammad K. Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Publisia J Ilmu Adm Publik* 2017;2. doi:10.26905/pjiap.v2i2.2021.
- [4] Nahrudin Z. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Otoritas J Ilmu Pemerintah* 2014;4. doi:10.26618/ojip.v4i2.95.
- [5] Dimas Rizky Gunawan. Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). doi: 10.26740/jaj.v8n1.p72-102.
- [6] Gayatri G, Latrini MY, Widhiyani NLS. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *J Ekon Kuantitatif Terap* 2017.

- doi:10.24843/JEKT.2017.v10.i02.p07.
- [7] Muljo HH, Kurniawati H, Pahala P. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran. *Binus Bus Rev* 2014;5:537. doi:10.21512/bbr.v5i2.1014.
- [8] Andriani W, Rosita I, Ihsan H. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang. *J Akunt Manaj* 2015;10:51–9. doi:https://doi.org/10.30630/jakmenpn p.10.2.54.
- [9] Sofyani H, Akbar R. Hubungan Faktor Internal Institusi Dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Pemerintah Daerah. *J Akunt Dan Keuang Indones* 2013;10:184–205. doi:10.21002/jaki.2013.10.
- [10] Hendratmi H, Mulyadi J, Widiastuti T. Pengaruh Transparansi Dan Komitmen Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran. *JIAFE (Jurnal Ilm Akunt Fak Ekon* 2017;3:76–93. doi:10.34204/jiafe.v3i2.767.
- [11] Gunawan I. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara; 2013.
- [12] Suharsimi A. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta; 2006.
- [13] Sabrudin D, Suhendra ES. No Title. *J Nusant Apl Manaj BISNIS* 2019;4:38. doi:10.29407/nusamba.v4i1.12848.
- [14] Miles BM, Huberman M. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo; 1992.
- [15] Pratolo S. *Perwujudan Keadilan Dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur Dan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah*. *J Akunt Dan Investasi* 2008;9:108–24.
- [16] Juwita R. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. *J Reviu Dan Akunt Keuang* 2014;4:615–22.
- [17] Setiyawan HE, Safri M. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik , Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. *J Perspekt Pembiayaan Dan Pembang Drh* 2016;12:1–4. doi:10.1108/IJPSM-08-2011-0105.
- [18] Wicaksono KW. Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Adm Publik)* 2015;19:17. doi:10.22146/jkap.7523.
- [19] Kristian Widya Wicaksono. Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *J Teknodik* 2018;20:3–15. doi:10.32550/teknodik.v20i2.236.
- [20] Rasul S. *Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran dalam perspektif UU no. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara: problem dan solusi sistem penganggaran di Indonesia*. Jakarta: Perum Percetakan Negara; 2003.
- [21] Darwanis, Sephi Chairunnisa. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *J Telaah Ris Akunt* 2013;6:150–74.